UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Pernyataan ~ i
Kata Pengantar ~ ii
Daftar Isi ~ iv
Daftar Tabel ~ viii
Daftar Gambar dan Kotak ~ ix
Daftar Lampiran ~ xi
Arti Singkatan ~ xii
Intisari ~ xiv
Abstract ~ xv

Bab I Pendahuluan

1.1 Isu Penelitian ~ 1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian ~ 7
1.3 Tujuan Penelitian ~ 15
1.4 Sistematika Penulisan Tesis ~ 16

Bab II Metode Penelitian

2.1 Pengantar ~ 19
2.2 Jenis Penelitian ~ 20
2.3 Objek Penelitian ~ 23
2.4 Pengumpulan Data ~ 25
2.4.1 Dokumentasi ~ 26
2.4.2 Wawancara Mendalam ~ 27
2.4.3 Observasi ~ 28
2.5 Kesahihan dan Keterandalan Data ~ 29
2.5.1 Kesahihan internal dan ekternal ~ 30
2.5.2 Keterandalan ~ 31
2.6 Analisis Data ~ 33
2.7 Ringkasan ~ 36

Bab III Kebijakan Publik: Beberapa Batasan dan Pendekatan Analisisnya

3.1 Pengantar ~ 38
3.2 Pemaknaan dan Dinamika Interaksi ‘Publik’ - ‘Privat’ ~ 39

Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.3 Apa Itu Kebijakan Publik ~ 42
3.4 Penggunaan Kerangka dalam Analisis Proses Kebijakan ~ 44
3.5 Pendekatan Tahapan dalam Analisis Proses Kebijakan ~ 47
3.6 Pendekatan Sub-Sistem dalam Analisis Proses Kebijakan ~ 51
3.7 Jejaring Kebijakan: Sebuah Model dalam Pendekatan Sub-Sistem Kebijakan ~ 53
3.7.1 Perubahan jejaring kebijakan ~ 62
3.7.2 Hubungan dalam jejaring kebijakan ~ 65
3.7.3 Pengaruh jejaring terhadap hasil kebijakan ~ 67
3.7.4 Keberadaan kepentingan dalam jejaring kebijakan ~ 68
3.7.5 Implikasi normatif dari jejaring kebijakan ~ 69
3.8 Ringkasan ~ 71

Bab IV Proses Perencanaan Tata Ruang Serta Pengalaman Pelaksanaannya di Kota Padang

4.1 Pengantar ~ 74
4.2 Perencanaan Tata Ruang ~ 75
4.2.1 Azas, tujuan, dan sasaran penataan ruang ~ 79
4.2.2 Perlunya penataan ruang ~ 81
4.2.3 Proses perencanaan tata ruang ~ 82
4.2.4 Perubahan paradigma perencanaan tata ruang ~ 85
4.2.5 Perencanaan tata ruang dan otonomi daerah ~ 87
4.2.6 Peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang ~ 89
4.3 Pengalaman Perencanaan Tata Ruang Kota Padang Dalam Tahun 1906 -2000 ~ 93
4.4 Ringkasan ~ 98

Bab V Kelangkaan Sumber Daya Ruang di Kota Padang Serta Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Penataannya

5.1 Pengantar ~ 100
5.2 Kelangkaan Sumber Daya Ruang di Kota Padang ~ 101
5.2.1 Berkurangnya lahan yang dapat diefektifkan ~ 101
5.2.2 Meningkatnya kepadatan penduduk ~ 106
5.2.3 Perekonomian yang semakin tumbuh ~ 109
5.3 Pemangku Kepentingan dalam Proses Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kota Padang ~ 111
5.3.1 Masyarakat ~ 112
5.3.2 Pelaku Bisnis ~ 114

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5.3.3 Pemerintahan Daerah ~ 116
5.3.3.1 Pemerintah Kota ~ 116
5.3.3.2 DPRD ~ 118
5.4 Ringkasan ~ 122

Bab VI Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013

6.1 Pengantar ~ 124
6.2 Inisiasi Penyusunan RTRW: Tahapan Tertutup ~ 125
6.2.1 Relevansi Inisiasi Penyusunan RTRW 2004-2013 ~ 125
6.2.2 Lancarnya inisiasi penyusunan RTRW 2004-2013 ~ 130
6.2.3 Ragam kepentingan dalam menginisiasi penyusunan RTRW 2004-2013 ~ 135
6.3 Komunitas Kebijakan Semu : Pembentukan Organisasi Pelaksana Penyusunan RTRW ~ 142
6.3.1 Kewenangan sebagai pagar pembatas komunitas kebijakan ~ 142
6.3.2 Komunitas kebijakan : kestabilan sekaligus kelesuan ~ 146
6.4 Jejaring Isu dalam Jejaring Kebijakan: Mulai Bermunculannya Aktor Lain Sejak Tahap Perumusan Dasar Pemikiran Penataan Ruang Kota Padang ~ 152
6.4.1 Aktor dalam jejaring isu, yang memiliki kepentingan tetapi tidak memiliki kewenangan ~ 156
6.4.2 Aktor dalam komunitas kebijakan, selain memiliki kepentingan juga memiliki kewenangan ~ 160
6.5 Membesarnya Jejaring Kebijakan Karena Bertambahnya Aktor Dalam Jejaring Isu ~ 162
6.5.1 Relasi dan depedensi sebagai syarat masuknya aktor ke dalam jejaring isu ~ 163
6.5.2 Pertukaran sumber daya antar aktor dalam jejaring kebijakan ~ 170
6.5.3 Pengaruh jejaring kebijakan terhadap RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013 ~ 174
6.6 Ringkasan ~ 178

Bab VII Ratifikasi Perda RTRW Tahun 2004-2013

7.1 Pengantar ~ 180
7.2 Tertundanya Agenda Ratifikasi RTRW ~ 181

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

7.3 Artikulasi Kepentingan ~ 186
7.4 Perubahan Tak Berarti Terhadap Ranperda ~ 194
7.5 Ringkasan ~ 197

Bab VIII Penutup

8.1 Kesimpulan ~ 200
8.2 Rekomendasi ~ 204

Daftar Pustaka ~ 208
Lampiran ~ 211

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013**
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Menentukan Metode Penelitian	32
Tabel 3.1	Model Komunitas Kebijakan dan Jejaring Kebijakan	81
Tabel 3.2	Tipe-tipe Jejaring Kebijakan: Karakteristik Komunitas Kebijakan dan Jejaring Isu	88
Tabel 5.1	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya	152
Tabel 5.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Menurut Kecamatan, Tahun 1998 – 2002	156
Tabel 5.3	Kepadatan Penduduk Kota Padang Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2001	157
Tabel 5.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 1998 – 2001	159
Tabel 5.5	Perentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2004	165
Tabel 5.6	Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Industri Tahun 2004	171

Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR DAN KOTAK

Gambar 3.1	Tahapan Kebijakan Publik Menurut Ripley	70
Gambar 3.2	Sub-Sistem Kebijakan	75
Gambar 3.3	Dimensi Gaya Kebijakan	85
Gambar 3.4	Hubungan Antar Aktor dalam Jejaring Kebijakan	93
Gambar 4.1	Sistem Perencanaan Tata Ruang Indonesia	116
Gambar 5.1	Sebagian Wilayah Kota Padang Dilihat Dari Udara	149
Gambar 5.2	Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Pantai di Kota Padang	149
Gambar 6.1	Konsentrasi Perhatian Masyararat Terhadap Tingkat Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Di Kota Padang	196
Kotak 6.1	Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kota Padang Oleh Tim Anggaran Eksekutif yang Bersifat Elitis	
Gambar 6.2	Jejaring Antar Aktor Pada Tahap Inisisasi RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	206
Gambar 6.3	Alur Diseminasi Informasi dan Pengaruh dalam Proses Inisiasi Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	207
Gambar 6.4	Jejaring Antar Aktor Pada Tahap Pembentukan Tim Kerja dan Tim Teknis Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	212
Gambar 6.5	Jejaring Antar Aktor Pada Tahap Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	217
Gambar 6.6	Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	220
Gambar 6.7	Jejaring Antar Aktor Pada Tahap	224

Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

	Perumusan Dasar Pemikiran Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013.	
Gambar 6.8	Jejaring Antar Aktor Pada Tahap Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Dalam Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013	249
Gambar 6.9	Alur Pertukaran Sumberdaya Antar Aktor Dalam Jejaring Kebijakan Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013	253
Gambar 7.1	Jejaring Antar Aktor Dalam Ratifikasi Perda RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013	282
Gambar 8.1	Variasi Tingkat Peranan Aktor	286

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013**
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	209
Lampiran 2	Inventarisasi Peraturan Perundang Undangan di Bidang Penataan Ruang	213
Lampiran 3	Analisis Kesesuaian Lahan Kota Padang	215
Lampiran 4	Organisasi Pelaksana Penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013	218

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ARTI SINGKATAN DAN LAMBANG

AKAP	:	Antar Kota Antar Provinsi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bawasda	:	Badan Pengawas Daerah
BFL	:	Bidang Fisik & Lingkungan
BII	:	Bank Internasional Indonesia
BPDB	:	Bidang Perencanaan Daerah Bawahan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTRTB	:	Dinas Tata Ruang Tata Bangunan
Ekbangkesra	:	Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Partai Golkar	:	Partai Golongan Karya
IAI	:	Ikatan Arsitek Indonesia
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IP	:	*Implementing Plan*
Jiwa/km^2	:	Jiwa per Kilo Meter per Segi
Kabag	:	Kepala Bagian
Kabid	:	Kepala Bidang
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kasi	:	Kepala Seksi
Kasubbid	:	Kepala Sub Bidang
Kasubdin	:	Kepala Sub Dinas
Kimpraswil	:	Permukiman dan Prasarana Wilayah
Km^2	:	Kilo Meter per Segi (Luas)
LDP	:	*Local Detailed Plan*
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Otda	:	Otonomi Daerah
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PBB	:	Partai Bulan Bintang
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto

Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun
2004-2013
PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno
Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PK	:	Partai Keadilan
PKS	:	Partai Keadilan Sejahtera
Plh	:	Pelaksana Harian
Polri	:	Polisi Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PT.PAS	:	PT. Parama Artha Santika
PU	:	Pekerjaan Umum
RASK	:	Rencana Anggaran Satuan Kerja
RIK	:	Rencana Induk Kota
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Rp.	:	Rupiah (satuan mata uang Indonesia)
RTR	:	Rencana Teknis Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
RTRWKab	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RUTRK	:	Rencana Umum Tata Ruang Kota
Sekda	:	Sekretaris Daerah
SK	:	Surat Keputusan
SPTRI	:	Sistem Perencanaan Tata Ruang Indonesia
SSP	:	*Strategic Spatial Plan*
Sumbar	:	Sumatera Barat
TA	:	Tahun Anggaran
TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan
TLA	:	Terminal Lintas Andalas
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TRB	:	Terminal Regional Bingkuang
Unand	:	Universitas Andalas
UU	:	Undang-Undang
WNI	:	Warga Negara Indonesia